



# **LAPORAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
M E D A N  
2 0 2 1**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi

### **BAB I           PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi
- I.3. Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan yang tercantum dalam Renja OPD

### **BAB II           PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA OPD**

- II.1. Perbandingan antara Program dan Kegiatan dalam Renja OPD Tahun 2021 dan Renstra OPD Tahun 2019-2023.

### **BAB III          TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA OPD**

- III.1 Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang tercantum dalam Renja/Renstra OPD
- III.2. IKU OPD dan Target Capaian Kinerja Tahun 2021

### **BAB IV          KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT**

- IV.1 Kendala yang Dihadapi
- IV.2 Saran Tindak Lanjut

### **BAB V           PENUTUP**

- V.1 Kesimpulan
- V.2 Rekomendasi

**Lampiran Laporan Triwulan III Tahun 2021 Renja OPD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provsu**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Tahunan (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang diuraikan secara rinci dan terukur. Evaluasi hasil terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi atau Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode Pelaksanaan Tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
2. Renja merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) tahun 2021.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan

alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah dan didasarkan kepada Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu Tahun 2019-2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam rancangan awal RKPD tahun 2021 agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **I.2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN EVALUASI**

Landasan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera utara tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 );

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ( Lembaran daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 51);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021;

### **I.3. TUJUAN, SASARAN , PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**

Maksud disusunnya Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Badan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 untuk Triwulan III adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 30 September 2021 serta mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Tujuan Evaluasi Rencana Kerja ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provsu pada tahun 2021 demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

| TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR  | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                  |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  |   |   |
| 1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan                    | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel | Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel                  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |
|   |  |  | Keuangan  |   |
| 2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah                 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah                    | Pengelolaan Aset Sesuai Peraturan Perundang-undangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran                  |
|   |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja |
| 3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota    | Pembinaan Pengelolan Keuangan Kab/Kota               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun                                       |
|   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah RKA yang disusun   |
|   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Perubahan RKA yang disusun   |
|   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah DPA yang disusun   |
|   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Perubahan DPA yang disusun   |
|   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun    |
|   |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Yang Dihasilkan                                       |
|   |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan</b>                           |
|   |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |
|   |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah administrasi yang tersedia   |
|   |  |  | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi                                    |
|   |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan   |
|   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan akhir tahun   |
|   |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun                               |
|   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD     | Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan                                       |
|   |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan                   |
|   |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>                |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Laporan penatausahaan BMD yang dihasilkan                        |  |   |   |



|  |  |
|--|--|
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</b>                           |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diolah                              |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Jumlah ASN yang mengikuti diklat   |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum</b>                                  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli                         |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli                                    |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli  |
| Penyediaan Bahan Logistik  | Jumlah bahan logistik yang disediakan  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli                                |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang                                      |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan   |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE                               |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                      |
| Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang dibeli   |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola                       |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan                           |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki               |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan                 |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara                         |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara                     |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab                 |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   | <b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu                                     |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu                 |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD  | Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD  |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD                                    |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD  | Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD   |
|  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD   |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  | Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD   |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  | Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD   |
|  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan  |
|  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan  |
|  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan  |
|  |  | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      |
|  |  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota   | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota   |
|  |  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota   | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota                                 |
|  |  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota            |
|  |  | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota  | Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut   |
|  |  | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah  | Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi  |
|  |  | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  |
|  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  | Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi   |
|  |  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah  | Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah   |
|  |  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya   | Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer  |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)               | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN |
|  |  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                    | Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov  |
|  |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait   | Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait  |
|  |  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan  | Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan  |
|  |  | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                        |
|  |  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban  | Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD   |
|  |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP  |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |
|  |  | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  |
|  |  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah sidur yang dihasilkan  |
|  |  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi   | Jumlah partisipan yang hadir  |
|  |  | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   |
|  |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak   |
|  |  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi  | Laporan pengelolaan dana bagi hasil   |
|  |  | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>      |
|  |  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah   | Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD  |
|  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   |
|  |  | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   |
|  |  | Penyusunan Standar Harga  | Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan  |
|  |  | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD  |
|  |  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Jumlah dokumen RKBMD yang disusun   |
|  |  | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD   |
|  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan  |
|  |  | Inventarisasi Barang Milik Daerah   | Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan  |
|  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan   |
|  |  | Penilaian Barang Milik Daerah   | Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian   |
|  |  | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Jumlah OPD Pemprov yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016  |
|  |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan  |
|  |  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan  |
|  |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah laporan BMD OPD Pemprov  |
|  |  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan   |

## **B A B II**

### **PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM RENJA OPD**

#### **II.1. Perbandingan antara Program dan Kegiatan dalam Renja OPD Tahun 2021 dan Renstra OPD Tahun 2019-2023.**

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Program sesuai dengan Urusan Pemerintahan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Penetapan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan berdasarkan Urusan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

Program merupakan pengelompokan pada kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada Perubahan RPJMD 2019-2023 ditetapkan program-program yang berkaitan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

#### **Program pada Renja dan Renstra.**

Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 dan Renja Tahun 2021 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Aset Daerah

Program kegiatan tersebut diatas dipergunakan menjadi Program Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan pada program adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pembangunan daerah.

## B A B III

### TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG TERCANTUM DALAM RENJA OPD

#### III.1. Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Tercantum dalam Renja/Renstra OPD

Pengertian **capaian kinerja** adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sedangkan **Realisasi Anggaran** adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara **anggaran** pendapatan dan belanja dengan **realisasinya yang** menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang- undangan

##### A. Target dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja/Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Triwulan III Tahun 2021 dilaksanakan setelah bulan September. Hasil dari evaluasi menjadi acuan untuk realisasi penyerapan pada triwulan tahun berikutnya.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sesuai Perda No. 4 Tahun 2020 Tentang APBD Provsu TA. 2021 dan Pergubsu No. 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA. 2021. Namun dilakukan Pergeseran Anggaran antara lain :

1. Pergeseran I dengan Pergubsu Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021;
2. Pergeseran II dengan Pergubsu Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021;
3. Pergeseran III dengan Pergubsu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021;
4. Pergeseran IV dengan Pergubsu Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 atas pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu ditunjang dengan anggaran belanja.

Pagu Belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 2,398,337,360,378,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 2,070,008,406,035,00 atau 86,31% terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  
Pagu program sebesar Rp. 29.715.425.459,00 dan realisasi program sebesar Rp. 16.747.754.643,00 atau 56,36%.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Pagu program sebesar Rp. 2.360.631.561.828,00 dan realisasi program sebesar Rp. 2.051.764.608.952,00 atau 86,92%
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
Pagu program sebesar Rp. 7.990.373.091,00 dan realisasi program sebesar Rp. 1.496.042.440.00 atau 18,72%.

Target dan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang menggambarkan kinerja dan anggaran defenitif dapat dilihat sesuai dengan tabel. 3.1.

## B. Target dan Capaian Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2021

Adapun target dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Triwulan III Tahun 2021 atas pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain :

**Tabel 3.2**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021 sd Triwulan III**

| PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN   | TARGET KINERJA |         | REALISASI |   |
|---|--|----------------|---------|-----------|---|
|   |  | TARGET         |         | REALISASI |   |
| <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |  |                |         |           |   |
| Keuangan  |  |                |         |           |   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | <b>Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran</b>                  | 98             | %       | 71        | % |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b> | 98             | %       | 65        | % |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun  | 2              | dokumen | 85        | % |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah RKA yang disusun  | 1              | dokumen | 0         | % |

|   |  |           |          |           |          |
|---|--|-----------|----------|-----------|----------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Perubahan RKA yang disusun  | 1         | dokumen  | 0         | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah DPA yang disusun  | 1         | dokumen  | 100       | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Perubahan DPA yang disusun  | 1         | dokumen  | 0         | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun         | 1         | dokumen  | 75        | %        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Yang Dihasilkan  | 4         | dokumen  | 100       | %        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan</b>                                | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>71</b> | <b>%</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  | 0         |          | <b>75</b> | <b>%</b> |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah administrasi yang tersedia  | 30        | item     | 70        | %        |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi   | 100       | dokumen  | 75        | %        |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan  | 12        | kali     | 70        | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan akhir tahun  | 1         | dokumen  | 90        | %        |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun                                    | 1         | dokumen  | 80        | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD     | Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan  | 1         | dokumen  | 75        | %        |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan                        | 1         | dokumen  | 75        | %        |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah</b>                     | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>71</b> | <b>%</b> |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Laporan penatausahaan BMD yang dihasilkan  | 1         | dokumen  | 71        | %        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</b>                             | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>70</b> | <b>%</b> |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diolah                                | 117       | orang    | 80        | %        |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah ASN yang mengikuti diklat   | 117       | orang    | 70        | %        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum</b>                                    | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>72</b> | <b>%</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli                           | 35        | buah     | 15        | %        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli                                      | 45        | buah     | 60        | %        |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli  | 20        | item     | 60        | %        |
| Penyediaan Bahan Logistik   | Jumlah bahan logistik yang disediakan  | 117       | orang    | 80        | %        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli                                  | 40        | item     | 60        | %        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang  | 10        | item     | 70        | %        |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi  | 90        | tamu     | 40        | %        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah          | 75        | kali     | 62        | %        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan   | 20        | dokumen  | 70        | %        |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE                                 | 20        | item     | 70        | %        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                        | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>85</b> | <b>%</b> |
| Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang dibeli   | 117       | item     | 85        | %        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>68</b> | <b>%</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola                         | 320<br>0  | buah     | 75        | %        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan                             | 3         | jenis    | 70        | %        |

|  |  |           |          |           |          |
|--|--|-----------|----------|-----------|----------|
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki   | 150       | unit     | 65        | %        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan   | 4         | jenis    | 62        | %        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>70</b> | <b>%</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara   | 7         | unit     | 61        | %        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara   | 17        | unit     | 80        | %        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab   | 1         | unit     | 60        | %        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   | <b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>75</b> | <b>%</b> |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                              | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>70</b> | <b>%</b> |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu   | 2         | dokumen  | 100       | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu   | 2         | dokumen  | 100       | %        |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD  | Jumlah Berita Acara Review RKA- SKPD   | 39        | dokumen  | 0         | %        |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD  | 39        | dokumen  | 100       | %        |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD  | Jumlah Berita Acara Review DPA- SKPD   | 39        | dokumen  | 90        | %        |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD  | 39        | dokumen  | 50        | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  | Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD  | 8         | dokumen  | 35        | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  | Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  | 9         | dokumen  | 57        | %        |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan   | 1         | dokumen  | 80        | %        |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan   | 1         | dokumen  | 80        | %        |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan   | 1         | dokumen  | 80        | %        |
| <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>70</b> | <b>%</b> |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota   | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota                                | 33        | dokumen  | 85        | %        |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota   | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota                      | 33        | dokumen  | 50        | %        |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota | 33        | dokumen  | 95        | %        |
| Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota  | Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut  | 33        | kab/kota | 35        | %        |
| Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah  | Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi   | 100       | orang    | 70        | %        |
| <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                               | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>68</b> | <b>%</b> |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  | Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi  | 49        | OPD      | 75        | %        |
| Penatausahaan Pembiayaan Daerah  | Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah  | 6         | BUMD     | 60        | %        |
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya   | Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer   | 12        | dokumen  | 75        | %        |



|   |   |           |          |           |          |
|---|---|-----------|----------|-----------|----------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                    | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN         | 14        | dokumen  | 75        | %        |
| Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas   | Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov  | 1         | dokumen  | 30        | %        |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  | Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait  | 1         | dokumen  | 75        | %        |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   | Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan  | 4         | dokumen  | 75        | %        |
| <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>80</b> | <b>%</b> |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban   | Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi   | 12        | dokumen  | 69        | %        |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD   | 2         | dokumen  | 100       | %        |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP  | 1         | dokumen  | 80        | %        |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 2         | dokumen  | 100       | %        |
| Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  | 1         | dokumen  | 95        | %        |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah sidur yang dihasilkan  | 1         | dokumen  | 60        | %        |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi   | Jumlah partisipan yang hadir  | 100       | orang    | 75        | %        |
| <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>85</b> | <b>%</b> |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak   | 0         | -        | 75        | %        |
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi  | Laporan pengelolaan dana bagi hasil   | 0         | -        | 85        | %        |
| <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>      | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>80</b> | <b>%</b> |
| Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah   | Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD  | 1         | dokumen  | 80        | %        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>80</b> | <b>%</b> |
| <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>98</b> | <b>%</b> | <b>80</b> | <b>%</b> |
| Penyusunan Standar Harga  | Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan  | 1         | dokumen  | 95        | %        |
| Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD  | 2         | dokumen  | 90        | %        |
| Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Jumlah dokumen RKBMD yang disusun   | 49        | dokumen  | 75        | %        |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD   | 1         | dokumen  | 75        | %        |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan  | 49        | OPD      | 75        | %        |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah   | Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan  | 49        | OPD      | 75        | %        |

|   |  |    |          |    |   |
|---|--|----|----------|----|---|
| Pengamanan Barang Milik Daerah  | Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan              | 49 | OPD      | 75 | % |
| Penilaian Barang Milik Daerah   | Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian                          | 49 | OPD      | 70 | % |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Jumlah OPD Pemprov yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016 | 49 | OPD      | 65 | % |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan                           | 48 | SK       | 75 | % |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan                     | 49 | dokumen  | 90 | % |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Jumlah laporan BMD OPD Pemprov                                 | 49 | dokumen  | 75 | % |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan                  | 33 | kab/kota | 65 | % |

## III.2. INDIKATOR OPD DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKAD PROVSU

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2021 sesuai tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN CAPAIAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**  
**TRIWULAN III TAHUN 2021**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | DEFENISI OPERASIONAL   | FORMULASI   | SUMBER DATA                          | CAPAIAN  |
|----|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel    | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan peraturan Perundang-undangan | 1. Tersedianya Dokumen Anggaran Tepat Waktu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah   | $\frac{\text{(Jumlah Dok. APBD yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. APBD yang harus tersedia)}} \times 100\%$  | Bidang Anggaran                      | 65%  |
|    |   |  | 2. Persentase OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%  | $\frac{\text{(Jumlah OPD penyerapan min.90\%)}}{\text{(Jumlah seluruh OPD)}} \times 100\%$  | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | 0%   |
|    |   |  | 3. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu tepat waktu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  | $\frac{\text{(Jumlah Dok. Pertanggungjawaban yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. Pertanggungjawaban yang harus tersedia)}} \times 100\%$  | Bidang Akuntansi                     | 100%   |
| 2. | Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas          | BMD dikelola dengan baik   | 4. Pengelolaan BMD yang lebih baik dan tersedianya laporan BMD sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan data asset daerah sesuai SAP</li> <li>- Aplikasi Simbada berbasis online</li> <li>- Jumlah tanah yang bersertifikat</li> </ul> | Bidang Aset                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Laporan Aset</li> <li>- Update aplikasi (QR Code)</li> <li>- 26,25% tanah yang disertifikat</li> </ul> |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD Kab/Kota  | 5. Persentase SK Gubsu yang selesai tentang APBD dan P.APBD Kab/Kota serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah | $\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} \times 100\%$  | Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota | 0%   |
|    |   |  |  | $\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$  | Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota | 27%  |
|    |   |  |  | $\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$   | Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota | 100%   |

## B. INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH OPD DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021

Kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023. Pencapaian kinerja dengan merealisasikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan Misi ke II yaitu : **"Bermartabat Dalam Politik"** dan Tujuannya yaitu : **"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH"** dan indikatornya yaitu : **"OPINI BPK WTP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN"**.

**Tabel 3.4**  
**INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**  
**TAHUN 2019-2023**

| NO | INDIKATOR                               | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |        |           |        |           |      |      | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |      |
|----|---|---|-----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|------|--|------|
|    |   |   | TAHUN 0                     | 2019   |           | 2020   |           | 2021 | 2022 |  | 2023 |
|    |   |   |                             | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |      |      |  |      |
| 1  | OPINI BPK WTP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN | WTP                                     | WTP                         | WTP    | WTP       | WTP    | WTP       | WTP  | WTP  | WTP                                      |      |

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI atas audit Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah 7 kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020. Untuk Tahun 2021 yang akan dievaluasi pada Tahun 2022 dengan Target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### C. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2021

Perubahan Kinerja Pembangunan Daerah yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan RPJMD 2019-2023 sebagaimana pada table. 3.5.

**Tabel 3.5**  
**INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVSU**  
**TAHUN 2021**

| No. | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | CAPAIAN TAHUN 2020 (TAHUN DASAR) | TARGET CAPAIAN TA. 2021 | REALISASI CAPAIAN TW. III TA. 2021   |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------|--|
| 1   | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan  | WTP                              | WTP                     | -  |
| 2   | Penetapan APBD   | Tepat Waktu                      | Tepat Waktu             | -  |
| 3   | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban  | Tepat Waktu                      | Tepat Waktu             | Tepat Waktu  |
| 4   | Persentase Tanah Milik Pemprov su yang disertifikasi   | 23,68                            | 43,93                   | 26,25  |
| 5   | Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun  | 100                              | 100                     | 50   |
| 6   | Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota | 100                              | 100                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK APBD Tahun 2022 Kab/Kota = 0% selesai</li> <li>2. SK P.APD Tahun 2021 Kab/Kota = 27% selesai</li> <li>3. SK pertanggungjawaban pelaksanaan APBD = 100% selesai</li> </ol> |

## **B A B IV**

### **KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT**

#### **4.1. Permasalahan Yang Dihadapi**

1. Adanya pergantian Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan sehingga Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan baru dengan melakukan pergeseran anggaran. Hal ini mengakibatkan kegiatan lambat dilaksanakan.
2. Terjadinya masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 dimana harus dilakukan protokol kesehatan secara ketat sehingga beberapa kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhambat dan kurang maksimal.

#### **4.2. Saran Tindak Lanjut**

1. Agar kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara segera diproses dan dilaksanakan sehingga target kinerja dapat tercapai.
2. Untuk mengejar capaian kinerja, Pimpinan beserta pejabat lainnya sebaiknya melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan merealisasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **B A B V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Kesimpulan**

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu disusun sebagai dokumen evaluasi terhadap perencanaan Triwulan III Tahun 2021 yang meliputi gambaran komitmen unit kerja ketika telah menetapkan tahapan pelaksanaan program/kegiatan pada satu tahun anggaran, sehingga unit kerja dan/atau Pimpinan dapat menilai apakah komitmen telah dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui permasalahan yang menjadi kendala dan segera melakukan langkah-langkah penyelesaiannya.

#### **5.2. Rekomendasi**

- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan acuan Pimpinan terhadap kemampuan unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah menjadi rencana defenitif dan telah dianggarkan pada APBD/DPA Tahun Anggaran 2021.
- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu akan merupakan pertimbangan dalam merencanakan program,kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya.

Medan,

2021

**an. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SEKRETARIS**

**Drs. HENDRA YUDI, M.Kes  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19670818 199401 1 002**

Filename: d98f-b834-1b84-ddb2.docx  
Directory: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp  
Template: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot  
m  
Title:  
Subject:  
Author: KASDA  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 10/7/2021 1:58:00 PM  
Change Number: 9  
Last Saved On: 10/11/2021 3:17:00 PM  
Last Saved By: Hendrik  
Total Editing Time: 238 Minutes  
Last Printed On: 10/12/2021 7:30:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 23  
Number of Words: 6.474 (approx.)  
Number of Characters: 42.149 (approx.)



**Tabel. 3.1.**  
**EVALUASI HASIL RENJA SKPD PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TRIWULAN III TAHUN 2021**

| NO  | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) |               | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020) |      | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021) |               | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |             |               |             |      |             |    |     | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021) |     | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%) |     | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021) |     |   |     | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---------------|---|------|--|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|----|-----|--|-----|--|-----|--|-----|---|-----|----------------------------|-----|--------------|-----|----|----|---|-----|--|--|--|--|
|   |  |  | 4   | Rp.           | 5   | Rp.  | 6  |               | 7                               |             | 8             |             | 9    |             | 10 |     | 11=7+8+9+10  |     | 12=11 /6 X 100%  |     | 13=5+11  |     |   |     |                            |     | 14= 13/4X100 |     | 15 | 16 |   |     |  |  |  |  |
|   |  |  |   |               |   |      | K  | Rp.           | K                               | Rp.         | K             | Rp.         | K    | Rp.         | K  | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K | Rp. |                            |     | K            | Rp. |    |    | K | Rp. |  |  |  |  |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |   |               |   |      |  |               |                                 |             |               |             |      |             |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Keuangan  |  |  |   |               |   |      |  |               |                                 |             |               |             |      |             |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran                     | 98 %   | 43.138.962.076  | 98 %          | 29.715.425.459  | 10 % | 3.378.367.526  | 36 %          | 6.589.906.828                   | 25 %        | 6.779.480.289 |             |      |             |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja    | 98 %   | 1.024.450.000   | 98 %          | 224.450.000   | 23 % | 0  | 21 %          | 14.700.000                      | 21 %        | 34.236.000    |             |      |             |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun  | 6  | dokumen   | 286.450.000   |   | 2    | dokumen  | 86.450.000    | 45 %                            | 0           | 20 %          | 14.700.000  | 20 % | 24.375.000  |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah RKA yang disusun  | 3  | dokumen   | 123.000.000   |   | 1    | dokumen  | 23.000.000    | 0 %                             | 0           | 0 %           | 0           | 0 %  | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Perubahan RKA yang disusun  | 3  | dokumen   | 123.000.000   |   | 1    | dokumen  | 23.000.000    | 0 %                             | 0           | 0 %           | 0           | 0 %  | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD  | Jumlah DPA yang disusun  | 6  | dokumen   | 123.000.000   |   | 2    | dokumen  | 23.000.000    | 100 %                           | 0           | 0 %           | 0           | 0 %  | 3.111.000   |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Perubahan DPA yang disusun  | 3  | dokumen   | 123.000.000   |   | 1    | dokumen  | 23.000.000    | 0 %                             | 0           | 0 %           | 0           | 0 %  | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun       | 12   | dokumen   | 123.000.000   |   | 4    | dokumen  | 23.000.000    | 25 %                            | 0           | 25 %          | 0           | 25 % | 3.375.000   |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Yang Dihasilkan  | 3  | dokumen   | 123.000.000   |   | 1    | dokumen  | 23.000.000    | 50 %                            | 0           | 25 %          | 0           | 25 % | 3.375.000   |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan                                     | 98 %   | 5.880.612.000   | 98 %          | 19.037.075.383  | 8 %  | 3.192.524.101  | 33 %          | 5.296.815.322                   | 30 %        | 3.984.101.174 |             |      |             |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar                                   | 300 %  | 52.729.390.149  | 100 %         | 17.576.463.383  | 25 % | 3.054.804.101  | 25 %          | 4.863.955.322                   | 25 %        | 3.778.561.174 |             |      |             |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah administrasi yang tersedia  | 130  | item  | 713.956.000   |   | 30   | item   | 13.956.000    | 0 %                             | 0           | 35 %          | 0           | 35 % | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                              | Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi                                       | 400  | dokumen   | 4.196.280.000 |   | 100  | dokumen  | 1.196.280.000 | 25 %                            | 125.720.000 | 25 %          | 396.860.000 | 25 % | 178.540.000 |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan  | 36   | kali  | 123.000.000   |   | 12   | kali   | 23.000.000    | 0 %                             | 0           | 35 %          | 0           | 35 % | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | Jumlah laporan keuangan akhir tahun  | 3  | dokumen   | 123.000.000   |   | 1    | dokumen  | 23.000.000    | 70 %                            | 0           | 10 %          | 0           | 10 % | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun                                  | 3  | dokumen   | 123.000.000   |   | 1    | dokumen  | 23.000.000    | 10 %                            | 0           | 35 %          | 0           | 35 % | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD             | Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan  | 3  | dokumen   | 481.076.000   |   | 1    | dokumen  | 161.076.000   | 25 %                            | 12.000.000  | 25 %          | 36.000.000  | 25 % | 27.000.000  |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan                      | 3  | dokumen   | 120.300.000   |   | 1    | dokumen  | 20.300.000    | 0 %                             | 0           | 25 %          | 0           | 50 % | 0           |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah                          | 98 %   | 790.400.000   | 98 %          | 190.400.000   | 6 %  | 12.000.000   | 35 %          | 33.600.000                      | 30 %        | 23.200.000    |             |      |             |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Laporan penatausahaan BMD yang dihasilkan  | 3  | dokumen   | 790.400.000   |   | 1    | dokumen  | 190.400.000   | 6 %                             | 12.000.000  | 35 %          | 33.600.000  | 30 % | 23.200.000  |    |     |  |     |  |     |  |     |   |     |                            |     |              |     |    |    |   |     |  |  |  |  |

| NO                               | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                       | TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) |          | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021) |           | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |                      |           |          |                   |           |          |                    |           |          |                      |  |    |           |          |                      | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021) |          | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%) | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021) |          | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 |           | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET       |              |              |
|----------------------------------|--|--|---|----------|---|--|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|----------------------|--|----|-----------|----------|----------------------|--|----------|--|--|----------|--|-----------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|
|                                  |  |  |   |          |   |  |           | I                               |                      |           |          | II                |           |          |                    | III       |          |                      |  | IV |           |          |                      |  |          |  |  |          |  |           |                            |           |              |              |
|                                  |  |  |   |          |   |  |           |                                 |                      |           |          |                   |           |          |                    |           |          |                      |  |    |           |          |                      |  |          |  |  |          |  |           |                            |           |              |              |
|                                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian</b>                             | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>1.581.736.000</b>  |  | <b>98</b> | <b>%</b>                        | <b>481.736.000</b>   | <b>15</b> | <b>%</b> | <b>13.450.000</b> | <b>25</b> | <b>%</b> | <b>104.261.000</b> | <b>30</b> | <b>%</b> | <b>13.900.000</b>    |  |    | <b>70</b> | <b>%</b> | <b>131.611.000</b>   | <b>82</b>  | <b>%</b> | <b>27</b>  | <b>80</b>  | <b>%</b> | <b>131.611.000</b>   | <b>82</b> | <b>%</b>                   | <b>8</b>  | <b>BPKAD</b> | <b>SUMUT</b> |
|                                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diolah                                | 351   | orang    | 694.200.000   |  | 117       | orang                           | 194.200.000          | 30        | %        | 12.900.000        | 25        | %        | 24.000.000         | 25        | %        | 12.000.000           |  |    | 80        | %        | 48.900.000           | 56   | %        | 25   | 80   | %        | 48.900.000   | 23        | %                          | 7         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | Jumlah ASN yang mengikuti diklat   | 351   | orang    | 887.536.000   |  | 117       | orang                           | 287.536.000          | 20        | %        | 550.000           | 20        | %        | 80.261.000         | 30        | %        | 1.900.000            |  |    | 70        | %        | 82.711.000           | 80   | %        | 29   | 70   | %        | 82.711.000   | 20        | %                          | 9         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum</b>                                    | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>15.164.664.976</b>   |  | <b>98</b> | <b>%</b>                        | <b>4.164.664.976</b> | <b>10</b> | <b>%</b> | <b>58.912.660</b> | <b>37</b> | <b>%</b> | <b>786.565.664</b> | <b>25</b> | <b>%</b> | <b>595.907.545</b>   |  |    | <b>72</b> | <b>%</b> | <b>1.441.385.869</b> | <b>73</b>  | <b>%</b> | <b>35</b>  | <b>72</b>  | <b>%</b> | <b>1.441.385.869</b>   | <b>73</b> | <b>%</b>                   | <b>10</b> | <b>BPKAD</b> | <b>SUMUT</b> |
|                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli                           | 135   | buah     | 415.214.000   |  | 35        | buah                            | 115.214.000          | 0         | %        | 0                 | 15        | %        | 2.760.000          | 0         | %        | 0                    |  |    | 15        | %        | 2.760.000            | 43   | %        | 2  | 15   | %        | 2.760.000  | 11        | %                          | 1         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli                                      | 125   | buah     | 2.143.381.376   |  | 45        | buah                            | 743.381.376          | 0         | %        | 0                 | 35        | %        | 0                  | 25        | %        | 57.615.000           |  |    | 60        | %        | 57.615.000           | 133  | %        | 8  | 60   | %        | 57.615.000   | 48        | %                          | 3         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli  | 120   | buah     | 1.461.985.600   |  | 20        | item                            | 261.985.600          | 0         | %        | 0                 | 35        | %        | 0                  | 25        | %        | 70.347.950           |  |    | 60        | %        | 70.347.950           | 35   | %        | 27   | 60   | %        | 70.347.950   | 50        | %                          | 5         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Bahan Logistik  | Jumlah bahan logistik yang disediakan  | 351   | orang    | 1.928.133.000   |  | 117       | orang                           | 728.133.000          | 10        | %        | 0                 | 45        | %        | 231.787.400        | 25        | %        | 126.483.700          |  |    | 80        | %        | 358.271.100          | 45   | %        | 49   | 80   | %        | 358.271.100  | 23        | %                          | 19        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli                                  | 140   | item     | 1.100.056.000   |  | 40        | item                            | 300.056.000          | 0         | %        | 0                 | 35        | %        | 86.574.600         | 25        | %        | 99.027.500           |  |    | 60        | %        | 185.602.100          | 150  | %        | 62   | 60   | %        | 185.602.100  | 43        | %                          | 17        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang  | 50  | item     | 379.760.000   |  | 10        | item                            | 79.760.000           | 0         | %        | 0                 | 45        | %        | 3.759.000          | 25        | %        | 4.430.000            |  |    | 70        | %        | 8.189.000            | 45   | %        | 10   | 70   | %        | 8.189.000  | 140       | %                          | 2         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi  | 690   | tamu     | 568.000.000   |  | 90        | tamu                            | 68.000.000           | 0         | %        | 0                 | 40        | %        | 0                  | 0         | %        | 0                    |  |    | 40        | %        | 0                    | 44   | %        | 0  | 40   | %        | 0  | 6         | 0                          | BPKAD     | SUMUT        |              |
|                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah          | 275   | kali     | 5.383.615.000   |  | 75        | kali                            | 1.383.615.000        | 2         | %        | 46.912.660        | 35        | %        | 356.684.664        | 25        | %        | 179.503.395          |  |    | 62        | %        | 583.100.719          | 37   | %        | 42   | 62   | %        | 583.100.719  | 22        | %                          | 11        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan   | 220   | dokumen  | 435.500.000   |  | 20        | dokumen                         | 35.500.000           | 10        | %        | 0                 | 35        | %        | 0                  | 25        | %        | 0                    |  |    | 70        | %        | 0                    | 35   | %        | 0  | 70   | %        | 0  | 32        | 0                          | BPKAD     | SUMUT        |              |
|                                  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE                                 | 60  | buah     | 1.349.000.000   |  | 20        | item                            | 449.000.000          | 10        | %        | 12.000.000        | 35        | %        | 105.000.000        | 25        | %        | 117.000.000          |  |    | 70        | %        | 234.000.000          | 38   | %        | 52   | 70   | %        | 234.000.000  | 117       | %                          | 17        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                        | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>1.423.770.000</b>  |  | <b>98</b> | <b>%</b>                        | <b>623.770.000</b>   | <b>0</b>  | <b>%</b> | <b>0</b>          | <b>70</b> | <b>%</b> | <b>0</b>           | <b>15</b> | <b>%</b> | <b>70.833.000</b>    |  |    | <b>85</b> | <b>%</b> | <b>70.833.000</b>    | <b>70</b>  | <b>%</b> | <b>11</b>  | <b>85</b>  | <b>%</b> | <b>70.833.000</b>  | <b>87</b> | <b>%</b>                   | <b>5</b>  | <b>BPKAD</b> | <b>SUMUT</b> |
|                                  | Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang dibeli   | 351   | item     | 1.423.770.000   |  | 117       | item                            | 623.770.000          | 0         | %        | 0                 | 70        | %        | 0                  | 15        | %        | 70.833.000           |  |    | 85        | %        | 70.833.000           | 70   | %        | 11   | 85   | %        | 70.833.000   | 24        | %                          | 5         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>13.949.261.600</b>   |  | <b>98</b> | <b>%</b>                        | <b>4.149.261.600</b> | <b>10</b> | <b>%</b> | <b>87.024.310</b> | <b>33</b> | <b>%</b> | <b>248.688.200</b> | <b>25</b> | <b>%</b> | <b>1.969.379.270</b> |  |    | <b>68</b> | <b>%</b> | <b>2.305.091.780</b> | <b>70</b>  | <b>%</b> | <b>56</b>  | <b>68</b>  | <b>%</b> | <b>2.305.091.780</b>   | <b>70</b> | <b>%</b>                   | <b>17</b> | <b>BPKAD</b> | <b>SUMUT</b> |
|                                  | Penyediaan Jasa Surat, Menyurat  | Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola                         | 9.600   | buah     | 550.000.000   |  | 3200      | buah                            | 150.000.000          | 25        | %        | 6.000.000         | 25        | %        | 12.000.000         | 25        | %        | 9.000.000            |  |    | 75        | %        | 27.000.000           | 49   | %        | 18   | 75   | %        | 27.000.000   | 1         | %                          | 5         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan                             | 9   | jenis    | 2.694.061.600   |  | 3         | jenis                           | 894.061.600          | 20        | %        | 27.024.310        | 25        | %        | 97.248.200         | 25        | %        | 341.033.270          |  |    | 70        | %        | 465.305.780          | 45   | %        | 52   | 70   | %        | 465.305.780  | 778       | %                          | 17        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki                 | 450   | unit     | 900.000.000   |  | 150       | unit                            | 300.000.000          | 15        | %        | 0                 | 25        | %        | 31.440.000         | 25        | %        | 79.746.000           |  |    | 65        | %        | 111.186.000          | 40   | %        | 37   | 65   | %        | 111.186.000  | 14        | %                          | 12        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan                   | 14  | jenis    | 9.805.200.000   |  | 4         | jenis                           | 2.805.200.000        | 2         | %        | 54.000.000        | 35        | %        | 108.000.000        | 25        | %        | 1.539.600.000        |  |    | 62        | %        | 1.701.600.000        | 37   | %        | 61   | 62   | %        | 1.701.600.000  | 442       | %                          | 17        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>                     | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>3.324.087.500</b>  |  | <b>98</b> | <b>%</b>                        | <b>844.087.500</b>   | <b>10</b> | <b>%</b> | <b>14.456.455</b> | <b>35</b> | <b>%</b> | <b>105.276.642</b> | <b>25</b> | <b>%</b> | <b>87.923.300</b>    |  |    | <b>70</b> | <b>%</b> | <b>207.656.397</b>   | <b>71</b>  | <b>%</b> | <b>25</b>  | <b>70</b>  | <b>%</b> | <b>207.656.397</b>   | <b>71</b> | <b>%</b>                   | <b>6</b>  | <b>BPKAD</b> | <b>SUMUT</b> |
|                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara                           | 21  | unit     | 1.117.995.000   |  | 7         | unit                            | 277.995.000          | 1         | %        | 6.551.920         | 35        | %        | 77.638.485         | 25        | %        | 53.485.250           |  |    | 61        | %        | 137.675.655          | 36   | %        | 50   | 61   | %        | 137.675.655  | 292       | %                          | 12        | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertisiran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara                       | 51  | unit     | 1.607.550.000   |  | 17        | unit                            | 367.550.000          | 20        | %        | 7.904.535         | 35        | %        | 27.638.157         | 25        | %        | 34.438.050           |  |    | 80        | %        | 69.980.742           | 55   | %        | 19   | 80   | %        | 69.980.742   | 157       | %                          | 4         | BPKAD        | SUMUT        |
|                                  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab                   | 3   | unit     | 598.542.500   |  | 1         | unit                            | 198.542.500          | 0         | %        | 0                 | 35        | %        | 0                  | 25        | %        | 0                    |  |    | 60        | %        | 0                    | 35   | %        | 0  | 60   | %        | 0  | 2.000     | 0                          | BPKAD     | SUMUT        |              |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |  |  |   |          |   |  |           |                                 |                      |           |          |                   |           |          |                    |           |          | <b>73</b>            |  |    |           |          |                      |  |          |  |  |          |  |           |                            |           |              |              |
| <b>Predikat Kinerja</b>          |  |  |   |          |   |  |           |                                 |                      |           |          |                   |           |          |                    |           |          | <b>Sedang</b>        |  |    |           |          |                      |  |          |  |  |          |  |           |                            |           |              |              |

| NO   | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) |         |                | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021) |   |                   |    |   |                 | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |     |                   |    |   |    |   |                   | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021) |    | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%) |   | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021) |    | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 |                 | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |    |   |               |    |    |    |   |               |
|--|--|--|---|---------|----------------|---|--|---|-------------------|----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-------------------|----|---|----|---|-------------------|--|----|--|---|--|----|--|-----------------|----------------------------|-----|----|---|---------------|----|----|----|---|---------------|
|  |  |  | 98  | %       |                |   | 98   | % | 2.369.178.271.268 | I  |   | II              |                                 | III |                   | IV |   | 75 | % | 2.051.764.608.952 | 77   | 87 | 75   | % | #####  | 77 | 4.038  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
|  |  |  |   |         |                |   |  |   |                   | 13 | % | 368.723.514.653 | 35                              | %   | 1.213.906.561.933 | 35 | % |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  | 469.134.532.366 |                            |     | 75 | % | 1.674.191.230 | 71 | 19 | 70 | % | 1.674.191.230 |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   | <b>Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  |  | 98  | %       | 50.810.641.450 |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                              |  | 98  | %       | 24.641.861.350 |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu   |  | 6   | dokumen | 1.910.746.000  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu   |  | 6   | dokumen | 1.879.261.500  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD  | Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD  |  | 117   | dokumen | 1.097.830.000  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD  |  | 117   | dokumen | 1.402.864.400  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD  | Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD  |  | 117   | dokumen | 461.261.100    |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD  |  | 117   | dokumen | 703.043.100    |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  | Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD  |  | 24  | dokumen | 6.800.187.000  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  | Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  |  | 27  | dokumen | 8.944.765.500  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan   |  | 3   | dokumen | 466.997.500    |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan   |  | 3   | dokumen | 454.814.625    |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan   | Jumlah Koordinasi yang dilakukan   |  | 3   | dokumen | 520.090.625    |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota</b>  | <b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           |  | 98  | %       | 6.299.928.700  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota   | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota                                |  | 99  | dokumen | 2.329.088.700  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota   | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota                      |  | 99  | dokumen | 1.205.203.500  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota |  | 99  | dokumen | 1.370.689.000  |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota  | Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut  |  | 99  | dokumen | 416.360.000    |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |
| Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah  | Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi   |  | 300   | orang   | 978.587.500    |   |  |   |                   |    |   |                 |                                 |     |                   |    |   |    |   |                   |  |    |  |   |  |    |  |                 |                            |     |    |   |               |    |    |    |   |               |

| NO | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  | TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) |         |               | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021) |               |               | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |            |    |   |             |    |    |             | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021) |   | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%) |    | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021) |     | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 |               | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |       |       |
|----|---|---|---|---------|---------------|---|--|---------------|---------------|---------------------------------|------------|----|---|-------------|----|----|-------------|--|---|--|----|--|-----|--|---------------|----------------------------|-----|-------|-------|
|    |   |   | 98  | %       | 6.239.164.000 |   | 98   | %             | 2.239.164.000 | I                               |            | II |   | III         |    | IV |             | 68   | % | 726.955.204  | 69 | 32   | 68  | %  | 726.955.204   |                            |     | 69    | 12    |
|    |   |   |   |         |               |   |  |               |               | 20                              | %          | 23 | % | 25          | %  | 25 | %           |  |   |  |    |  |     |  |               |                            |     |       |       |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah   | 98  | %       | 6.239.164.000 | 98  | %  | 2.239.164.000 | 20            | %                               | 54.000.000 | 23 | % | 343.105.204 | 25 | %  | 329.850.000 | 68   | % | 726.955.204  | 69 | 32   | 68  | %  | 726.955.204   | 69                         | 12  | BPKAD | SUMUT |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi   | 147   | OPD     | 196.100.000   | 49  | OPD  | 108.300.000   | 25            | %                               | 0          | 25 | % | 3.840.000   | 25 | %  | 0           | 75   | % | 3.840.000  | 50 | 4  | 75  | %  | 3.840.000     | 51                         | 2   | BPKAD | SUMUT |
|    | Penatausahaan Pembiayaan Daerah   | Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah   | 18  | BUMD    | 104.400.000   | 6   | BUMD   | 54.400.000    | 10            | %                               | 0          | 25 | % | 0           | 25 | %  | 0           | 60   | % | 0  | 35 | 0  | 60  | %  | 0             | 333                        | 0   | BPKAD | SUMUT |
|    | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer  | 36  | dokumen | 918.080.000   | 12  | dokumen  | 266.000.000   | 25            | %                               | 12.000.000 | 25 | % | 28.800.604  | 25 | %  | 18.000.000  | 75   | % | 58.800.604   | 50 | 22   | 75  | %  | 58.800.604    | 208                        | 6   | BPKAD | SUMUT |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perbitungan Fihak Ketiga (PFK)                    | Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN | 42  | dokumen | 1.766.508.000 | 14  | dokumen  | 611.984.000   | 25            | %                               | 12.000.000 | 25 | % | 166.714.600 | 25 | %  | 101.850.000 | 75   | % | 280.564.600  | 50 | 46   | 75  | %  | 280.564.600   | 179                        | 16  | BPKAD | SUMUT |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas   | Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov  | 3   | dokumen | 164.700.000   | 1   | dokumen  | 54.900.000    | 10            | %                               | 0          | 10 | % | 0           | 10 | %  | 0           | 30   | % | 0  | 20 | 0  | 30  | %  | 0             | 1.000                      | 0   | BPKAD | SUMUT |
|    | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  | Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait  | 3   | dokumen | 2.240.376.000 | 1   | dokumen  | 755.380.000   | 25            | %                               | 24.000.000 | 25 | % | 125.710.000 | 25 | %  | 105.150.000 | 75   | % | 254.860.000  | 50 | 34   | 75  | %  | 254.860.000   | 2.500                      | 11  | BPKAD | SUMUT |
|    | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   | Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan  | 12  | dokumen | 849.000.000   | 4   | dokumen  | 388.200.000   | 25            | %                               | 6.000.000  | 25 | % | 18.040.000  | 25 | %  | 104.850.000 | 75   | % | 128.890.000  | 50 | 33   | 75  | %  | 128.890.000   | 625                        | 15  | BPKAD | SUMUT |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                               | 98  | %       | 7.752.028.200 | 98  | %  | 2.752.028.200 | 5,66          | %                               | 68.672.543 | 49 | % | 150.364.400 | 25 | %  | 819.101.440 | 80   | % | 1.038.138.383  | 81 | 38   | 80  | %  | 1.038.138.383 | 81                         | 13  | BPKAD | SUMUT |
|    | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban   | Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi   | 36  | dokumen | 464.991.850   | 12  | dokumen  | 153.663.950   | 4             | %                               | 6.000.000  | 40 | % | 24.000.000  | 25 | %  | 18.000.000  | 69   | % | 48.000.000   | 44 | 31   | 69  | %  | 48.000.000    | 191                        | 10  | BPKAD | SUMUT |
|    | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD   | 6   | dokumen | 1.972.022.000 | 2   | dokumen  | 720.050.000   | 30            | %                               | 62.672.543 | 60 | % | 94.786.400  | 10 | %  | 284.346.000 | 100  | % | 441.804.943  | 96 | 61   | 100 | %  | 441.804.943   | 1.667                      | 22  | BPKAD | SUMUT |
|    | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP  | 3   | dokumen | 2.218.504.100 | 1   | dokumen  | 742.913.500   | 20            | %                               | 0          | 35 | % | 0           | 25 | %  | 195.000.000 | 80   | % | 195.000.000  | 35 | 26   | 80  | %  | 195.000.000   | 2.667                      | 9   | BPKAD | SUMUT |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Tersedianya perda tentang pelaksanaan APBD dan pergu tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD             | 6   | dokumen | 1.196.996.000 | 2   | dokumen  | 430.684.000   | 0             | %                               | 0          | 70 | % | 0           | 30 | %  | 197.060.440 | 100  | % | 197.060.440  | 35 | 46   | 100 | %  | 197.060.440   | 1.667                      | 16  | BPKAD | SUMUT |
|    | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  | 3   | dokumen | 513.972.000   | 1   | dokumen  | 171.324.000   | 0             | %                               | 0          | 70 | % | 0           | 25 | %  | 124.695.000 | 95   | % | 124.695.000  | 70 | 73   | 95  | %  | 124.695.000   | 3.167                      | 24  | BPKAD | SUMUT |

| NO                               | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN   | TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) |          | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021) |  | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |          |                          |           |          |                        |                 |          |                          |           |                   |                        |           |          |                          |           | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021) |           | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%) | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021) |                   | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 |           | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET                  |              |                   |       |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|---|----------|---|--|--|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------|----------|--------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|--|-----------|--|--|-------------------|--|-----------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                  |  |  |   |          |   |  |  | I                               |          |                          |           | II       |                        |                 |          | III                      |           |                   |                        | IV        |          |                          |           |  |           |  |  |                   |  |           |                            |                      |              |                   |       |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  |  |  |   |          |   |  |  |                                 |          |                          |           |          |                        |                 |          |                          |           |                   |                        |           |          |                          |           |  |           |  |  |                   |  |           |                            |                      |              |                   |       |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                    | Jumlah sidur yang dihasilkan   | 3   | dokumen  | 242.928.000   |  |  | 1                               | dokumen  | 242.928.000              | 0         | %        |                        | 0               | 35       | %                        |           | 0                 | 25                     | %         |          | 0                        |           |  | 60        | %  |  | 0                 | 35   | 0         | 60                         | %                    |              | 0                 | 2.000 | 0       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi  | Jumlah partisipan yang hadir   | 300   | orang    | 832.154.250   |  |  | 100                             | orang    | 290.464.750              | 15        | %        |                        | 0               | 35       | %                        |           | 31.578.000        | 25                     | %         |          | 0                        |           |  | 75        | %  |  | 31.578.000        | 75   | 11        | 75                         | %                    |              | 31.578.000        | 25    | 4       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                      | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>1.228.856.000</b>  |  |  | <b>98</b>                       | <b>%</b> | <b>2.351.367.629.818</b> | <b>10</b> | <b>%</b> | <b>368.467.705.310</b> | <b>50</b>       | <b>%</b> | <b>1.212.493.230.448</b> | <b>25</b> | <b>%</b>          | <b>465.643.327.076</b> | <b>85</b> | <b>%</b> | <b>2.046.604.262.834</b> | <b>87</b> | <b>87</b>  | <b>85</b> | <b>%</b>   | <b>#####</b>   | <b>87</b>         | <b>166.545</b>   |           |                            |                      |              |                   |       |         |       | BPKAD | SUMUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak  | Laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak  | 3   | Laporan  | 100.000.000   |  |  | 1                               | -        | 14.155.713.363           | 0         | %        |                        | 0               | 50       | %                        |           | 788.656.914       | 25                     | %         |          | 0                        |           |  | 75        | %  |  | 788.656.914       | 75   | 6         | 75                         | %                    |              | 788.656.914       | 2.500 | 789     | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi   | Laporan pengelolaan dana bagi hasil  | 3   | Laporan  | 300.000.000   |  |  | 1                               | -        | 2.337.211.916.455        | 10        | %        |                        | 368.467.705.310 | 50       | %                        |           | 1.211.704.573.534 | 25                     | %         |          | 465.643.327.076          |           |  | 85        | %  |  | 2.045.815.605.920 | 85   | 88        | 85                         | %                    |              | 2.045.815.605.920 | 2.833 | 681.939 | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                  | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b> | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>4.648.803.200</b>  |  |  | <b>98</b>                       | <b>%</b> | <b>1.770.707.200</b>     | <b>20</b> | <b>%</b> | <b>82.486.800</b>      | <b>35</b>       | <b>%</b> | <b>247.388.701</b>       | <b>25</b> | <b>%</b>          | <b>494.394.700</b>     | <b>80</b> | <b>%</b> | <b>824.270.201</b>       | <b>55</b> | <b>47</b>  | <b>80</b> | <b>%</b>   | <b>824.270.201</b>   | <b>55</b>         | <b>47</b>  | <b>80</b> | <b>%</b>                   | <b>824.270.201</b>   | <b>2.667</b> | <b>20</b>         |       |         | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                              | Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD   | 3   | Dokumen  | 4.201.667.200   |  |  | 1                               | dokumen  | 1.770.707.200            | 20        | %        |                        | 82.486.800      | 35       | %                        |           | 247.388.701       | 25                     | %         |          | 494.394.700              |           |  | 80        | %  |  | 824.270.201       | 55   | 47        | 80                         | %                    |              | 824.270.201       | 2.667 | 20      | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |  |  |   |          |   |  |  |                                 |          |                          |           |          |                        |                 |          | <b>77</b>                |           |                   |                        |           |          |                          |           |  |           |  |  |                   |  |           |                            |                      |              |                   |       |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Predikat Kinerja</b>          |  |  |   |          |   |  |  |                                 |          |                          |           |          |                        |                 |          | <b>Tinggi</b>            |           |                   |                        |           |          |                          |           |  |           |  |  |                   |  |           |                            |                      |              |                   |       |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>21.990.373.091</b>   |  |  | <b>98</b>                       | <b>%</b> | <b>7.990.373.091</b>     | <b>20</b> | <b>%</b> | <b>115.161.564</b>     | <b>35</b>       | <b>%</b> | <b>436.900.440</b>       | <b>25</b> | <b>%</b>          | <b>943.980.436</b>     | <b>80</b> | <b>%</b> | <b>1.496.042.440</b>     | <b>82</b> | <b>18,72</b>   | <b>80</b> | <b>%</b>   | <b>1.496.042.440</b>   | <b>82</b>         | <b>18,72</b>   | <b>80</b> | <b>%</b>                   | <b>1.496.042.440</b> | <b>82</b>    | <b>7</b>          |       |         | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>98</b>   | <b>%</b> | <b>21.990.373.091</b>   |  |  | <b>98</b>                       | <b>%</b> | <b>7.990.373.091</b>     | <b>20</b> | <b>%</b> | <b>115.161.564</b>     | <b>35</b>       | <b>%</b> | <b>436.900.440</b>       | <b>25</b> | <b>%</b>          | <b>943.980.436</b>     | <b>80</b> | <b>%</b> | <b>1.496.042.440</b>     | <b>82</b> | <b>18,72</b>   | <b>80</b> | <b>%</b>   | <b>1.496.042.440</b>   | <b>82</b>         | <b>18,72</b>   | <b>80</b> | <b>%</b>                   | <b>1.496.042.440</b> | <b>82</b>    | <b>7</b>          |       |         | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penyusunan Standar Harga   | Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan   | 3   | dokumen  | 1.200.187.980   |  |  | 1                               | dokumen  | 400.062.660              | 60        | %        |                        | 0               | 25       | %                        |           | 0                 | 10                     | %         |          | 97.160.000               |           |  | 95        | %  |  | 97.160.000        | 95   | 24        | 95                         | %                    |              | 97.160.000        | 3.167 | 8       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                     | Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD   | 6   | dokumen  | 1.119.894.070   |  |  | 2                               | dokumen  | 399.964.690              | 30        | %        |                        | 0               | 40       | %                        |           | 0                 | 20                     | %         |          | 0                        |           |  | 90        | %  |  | 0                 | 70   | 0         | 90                         | %                    |              | 0                 | 1.500 | 0       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah   | Jumlah dokumen RKBM yang disusun   | 147   | dokumen  | 955.525.710   |  |  | 49                              | dokumen  | 318.508.570              | 20        | %        |                        | 0               | 30       | %                        |           | 0                 | 25                     | %         |          | 39.780.000               |           |  | 75        | %  |  | 39.780.000        | 50   | 12        | 75                         | %                    |              | 39.780.000        | 51    | 4       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD  | 3   | dokumen  | 740.821.830   |  |  | 1                               | dokumen  | 246.940.610              | 20        | %        |                        | 0               | 30       | %                        |           | 0                 | 25                     | %         |          | 19.351.500               |           |  | 75        | %  |  | 19.351.500        | 50   | 8         | 75                         | %                    |              | 19.351.500        | 2.500 | 3       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah  | Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan   | 147   | OPD      | 3.228.507.483   |  |  | 49                              | OPD      | 1.076.169.161            | 20        | %        |                        | 92.961.564      | 30       | %                        |           | 259.876.628       | 25                     | %         |          | 211.442.346              |           |  | 75        | %  |  | 564.280.538       | 30   | 52        | 75                         | %                    |              | 564.280.538       | 51    | 17      | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Inventarisasi Barang Milik Daerah  | Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan   | 147   | OPD      | 1.016.439.000   |  |  | 49                              | OPD      | 338.813.000              | 20        | %        |                        | 0               | 30       | %                        |           | 29.265.000        | 25                     | %         |          | 0                        |           |  | 75        | %  |  | 29.265.000        | 30   | 9         | 75                         | %                    |              | 29.265.000        | 51    | 3       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Pengamanan Barang Milik Daerah   | Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan  | 147   | OPD      | 6.891.866.798   |  |  | 49                              | OPD      | 2.681.887.700            | 20        | %        |                        | 0               | 30       | %                        |           | 40.898.812        | 25                     | %         |          | 177.580.640              |           |  | 75        | %  |  | 218.479.452       | 30   | 8         | 75                         | %                    |              | 218.479.452       | 51    | 3       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penilaian Barang Milik Daerah  | Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian  | 147   | OPD      | 1.729.274.780   |  |  | 49                              | OPD      | 609.758.260              | 10        | %        |                        | 0               | 30       | %                        |           | 13.986.000        | 30                     | %         |          | 205.175.000              |           |  | 70        | %  |  | 219.161.000       | 60   | 36        | 70                         | %                    |              | 219.161.000       | 48    | 13      | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Jumlah OPD Pemprovsu yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016   | 147   | OPD      | 776.349.000   |  |  | 49                              | OPD      | 258.783.000              | 0         | %        |                        | 0               | 40       | %                        |           | 0                 | 25                     | %         |          | 0                        |           |  | 65        | %  |  | 0                 | 40   | 0         | 65                         | %                    |              | 0                 | 44    | 0       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan   | 144   | SK       | 2.537.985.940   |  |  | 48                              | SK       | 1.028.311.940            | 25        | %        |                        | 1.800.000       | 25       | %                        |           | 80.439.000        | 25                     | %         |          | 141.000.000              |           |  | 75        | %  |  | 223.239.000       | 75   | 22        | 75                         | %                    |              | 223.239.000       | 52    | 9       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   | Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan   | 147   | dokumen  | 738.791.000   |  |  | 49                              | dokumen  | 279.597.000              | 50        | %        |                        | 20.400.000      | 25       | %                        |           | 11.835.000        | 15                     | %         |          | 45.410.950               |           |  | 90        | %  |  | 77.645.950        | 75   | 28        | 90                         | %                    |              | 77.645.950        | 61    | 11      | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   | Jumlah laporan BMD OPD Pemprovsu   | 147   | dokumen  | 520.716.000   |  |  | 49                              | dokumen  | 173.572.000              | 10        | %        |                        | 0               | 40       | %                        |           | 600.000           | 25                     | %         |          | 7.080.000                |           |  | 75        | %  |  | 7.680.000         | 40   | 4         | 75                         | %                    |              | 7.680.000         | 51    | 1       | BPKAD | SUMUT |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO   | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  | TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2019-2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) |          |             | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (s/d 2020) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2021) |    |     | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |             |   |   |   |        |   |   | REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2021) | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%) | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021) | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021 | UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB | KET |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |       |
|--|--|---|---|----------|-------------|---|--|----|-----|---------------------------------|-------------|---|---|---|--------|---|---|--|--|--|--|----------------------------|-----|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|-------|-------|
|  |  |   |   |          |             |   | I  | II | III | IV                              |             |   |   |   |        |   |   |  |  |  |  |                            |     |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |       |
|  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota              | Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan | 99  | kab/kota | 534.013.500 |   |  |    | 33  | kab/kota                        | 178.004.500 | 0 | % | 0 | 40     | % | 0 | 25   | %  | 0  |  |                            |     | 65 | % | 0 | 40 | % | 0 | 65 | % | 0 | 66 | % | 0 | BPKAD | SUMUT |
| Rata-rata Capaian Kinerja  |  |   |   |          |             |   |  |    |     |                                 |             |   |   |   | 80     |   |   |  |  |  |  |                            |     |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |       |
| Predikat Kinerja   |  |   |   |          |             |   |  |    |     |                                 |             |   |   |   | Tinggi |   |   |  |  |  |  |                            |     |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |       |
| <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |  |   |   |          |             |   |  |    |     |                                 |             |   |   |   | 77     |   |   |  |  |  |  |                            |     |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |       |
| <b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                             |  |   |   |          |             |   |  |    |     |                                 |             |   |   |   | Tinggi |   |   |  |  |  |  |                            |     |    |   |   |    |   |   |    |   |   |    |   |   |       |       |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya upaya untuk menyelesaikan kegiatan dan tersedianya dana

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi Pandemi Covid-19 dan adanya peraturan perundang-undangan yang baru

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Berupaya untuk menyelesaikan kegiatan agar target dapat tercapai

Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya : Reschedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan

Disusun  
Medan,  
**An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SEKRETARIS**

**Drs. HENDRA YUDI, M.Kes  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19670818 199401 1 002**

Dievaluasi  
Medan,  
**KEPALA BAPPEDA PROVSU**